



UPAYA MENGATASI DOMINASI PEKERJA INFORMAL

Luthvi Febryka Nola*

Abstrak

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia merupakan pekerja informal. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi negara. Tulisan ini mengkaji penyebab tingginya jumlah pekerja informal. Dengan mengetahui faktor penyebab diharapkan dapat ditemukan upaya untuk mengatasinya. Dari pembahasan diketahui bahwa tingginya jumlah pekerja informal disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja formal, rendahnya kualitas tenaga kerja, kemiskinan, mudahnya bekerja secara informal, dan masalah pendataan. Sedangkan upaya mengatasinya antara lain dengan memperbanyak lapangan kerja formal, memaksimalkan sekolah rakyat dan pemagangan, serta memperluas cakupan jaminan sosial dan memperbaiki pendataan. Usaha ini membutuhkan kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan. Komisi IX DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi melalui ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung perkembangan pekerjaan formal. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga perlu mengingatkan bahaya dari dominasi pekerja informal kepada pemerintah.

Pendahuluan

Menurut Konferensi Perburuhan Internasional (International Conference of Labour Statisticians/ICLS) ke-17, pekerja kegiatan informal adalah karyawan yang hubungan kerjanya tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan atau dalam praktiknya tidak tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan, perpajakan, pendapatan, dan perlindungan sosial (BPS, 2025b). Dalam tiga tahun terakhir penduduk Indonesia mayoritas bekerja sebagai pekerja informal. Pada Agustus 2023 jumlahnya mencapai 59,11 persen, Agustus 2024 sebesar 57,95 persen, dan Agustus 2025 sebesar 57,80 persen (BPS, 2025a). Meskipun persentase pekerja informal cenderung mengalami penurunan, namun persentase tersebut tetap lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja.

Bekerja sebagai pekerja informal tidak terlalu baik karena kurang terlindungi oleh peraturan yang berlaku. Selain itu mereka juga tidak memperoleh hak-hak kerja tertentu, seperti pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK), upah yang layak, cuti tahunan, atau izin sakit berbayar (BPS, 2025b). Sedangkan bagi negara, tingginya jumlah pekerja informal juga berbahaya karena mengurangi kapasitas negara dalam perencanaan ekonomi, menurunkan

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: luthvi.nola@dpr.go.id

pendapatan pajak, dan meningkatkan ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial, sekaligus memperlambat pengembangan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional (Anggraeni, 2024).

Besarnya jumlah pekerja informal ini juga menjadi perhatian para akademisi pada saat diundang oleh Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI pada tanggal 18 November 2025. Dengan demikian, tulisan ini mengkaji penyebab tingginya jumlah penduduk yang bekerja di kegiatan informal. Dengan mengetahui faktor penyebab diharapkan dapat ditemukan upaya untuk mengatasinya.

Faktor Penyebab Dominasi Pekerja Informal

Tingginya jumlah pekerja informal disebabkan sejumlah faktor yaitu: *pertama*, ketersediaan lapangan kerja formal yang tidak sebanding dengan penambahan angkatan kerja. Pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja sebanyak 152,11 juta. Angka tersebut naik pada Agustus 2025 menjadi 154 juta. Namun lapangan kerja formal yang tersedia pada Agustus 2024 adalah 60,81 juta sedangkan pada Agustus 2025 adalah 61,84 juta (BPS, 2025a). Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja formal dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang tidak tertampung tentunya akan bekerja secara informal.

Kedua, rendahnya kualitas tenaga kerja. Menurut data badan pusat statistik (BPS), pada Agustus 2025 sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan sekolah dasar ke bawah, yaitu sebanyak 34,75 persen (BPS, 2025a). Kebanyakan dari mereka tentunya bekerja di kegiatan informal mengingat sulit bagi mereka untuk memenuhi syarat pekerjaan formal yang biasanya memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi apabila dibandingkan menjadi pekerja informal. *Ketiga*, adalah mudahnya akses bekerja secara informal. Pekerjaan informal biasanya tidak membutuhkan modal besar, persyaratan administrasi juga minim, tidak memerlukan standar pendidikan atau keterampilan yang tinggi dan tidak ada seleksi yang ketat untuk jadi tenaga kerjanya (Lismalasari & Aswitari, 2021). Contoh pekerjaannya adalah pengemudi *online*, tukang parkir, pedagang kaki lima.

Keempat, faktor kemiskinan yang menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini akan membuat anggota keluarga mencari cara cepat untuk menambah penghasilan, termasuk melalui pekerjaan informal yang bisa langsung menghasilkan uang. *Kelima*, faktor pendataan. BPS mengategorikan semua pekerjaan di luar pengusaha yang dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai sebagai pekerjaan informal. Artinya yang termasuk pekerja informal tersebut adalah tenaga kerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian atau non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Padahal bisa jadi tenaga kerja yang bekerja sendiri dan pekerja bebas merupakan pekerjaan formal mereka membayar pajak, dan punya jaminan sosial. Selain itu, fleksibilitas dari pekerja informal seperti tidak perlu terdaftar di kementerian terkait, membuat pendataan mereka menjadi sulit untuk dilakukan.

Kelima faktor penyebab ini apabila tidak diatasi tentunya akan membuat jumlah pekerja informal akan terus bertambah. Berbagai dampak negatif juga harus ditanggung oleh pekerja dan negara. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi faktor penyebab ini.

Upaya Mengatasi Dominasi Pekerja Informal

Upaya mengatasi tingginya jumlah pekerja informal tentunya tidak dapat lepas dari faktor penyebab. Untuk mengatasi keterbatasan lapangan kerja formal tentu dengan memperbanyak lapangan kerja tersebut. Pemerintah sudah berjanji akan membuka 19 juta lapangan kerja dengan target pemenuhan di Tahun 2029. Untuk meningkatkan jumlah pekerja formal tentunya pemerintah dapat mengarahkan pembukaan lapangan kerja tersebut kepada pekerjaan formal. Apabila diamati data perbandingan penduduk yang bekerja di kegiatan formal dan informal maka, ada selisih sekitar 20 juta pekerja setiap tahunnya (BPS, 2025a). Dengan demikian apabila 19 juta tersebut dapat diarahkan pada kegiatan formal, tentunya dapat membalikkan situasi di mana pekerja formal dapat melebihi informal.

Berkaitan dengan faktor kedua terkait dengan kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, pemerintah sebetulnya sudah memiliki program sekolah rakyat dan pemagangan. Fokus utama sekolah rakyat adalah anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, tetapi beberapa juga bisa mencakup sekolah menengah atas. Kondisi ini dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan pencari kerja. Sedangkan pemagangan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengenalan budaya kerja serta membuka kesempatan untuk bekerja bagi peserta magang. Pemagangan bagi *fresh graduate* yang dilakukan pemerintah harusnya fokus dilakukan di tempat kerja yang menyediakan lapangan kerja formal sehingga peserta berkesempatan menjadi pekerja formal.

Penyebab ketiga terkait kemudahan akses menjadi pekerja informal. Harusnya kemudahan juga diberikan kepada pekerjaan informal untuk bisa menjadi pekerjaan formal seperti kemudahan perizinan dan perpajakan. Kondisi ini memungkinkan pekerjaan informal beralih kepada pekerjaan formal. Program modernisasi kapal nelayan dan kampung nelayan merah putih sebetulnya dapat mengembangkan nelayan menjadi pekerja formal dengan menciptakan lapangan kerja bagi pekerja/nelayan lainnya (Chatherine & Akbar, 2025).

Penyebab keempat adalah faktor kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk meringankan beban kemiskinan, pemerintah telah memberikan jaminan sosial. Adanya skema penerima bantuan iuran pada jaminan kesehatan nasional merupakan upaya positif untuk membantu warga miskin. Selain itu, terdapat juga bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda). Terbaru ada bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pengurus Koperasi Merah Putih yang diberikan oleh Pemda Kota Manado (Tigauw, 2025).

Penyebab kelima adalah pendataan, BPS perlu memperluas pendataan bagi pekerja informal. Sehingga bantuan program menjadi tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pendataan terpadu secara berkala dengan memanfaatkan sistem digital agar informasi pekerja lebih mudah diperbarui dan akurat. Upaya ini harus didukung dengan mempermudah legalitas usaha, sehingga pekerja informal mau mendaftar dan tercatat secara resmi. Kerja sama dengan RT/RW, desa, komunitas pekerja, dan lembaga lokal juga penting agar pendataan lebih menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif seperti bantuan modal atau pelatihan bagi pekerja yang sudah terdaftar, serta meningkatkan sosialisasi manfaat pendataan.

Semua langkah-langkah di atas sesuai dengan rekomendasi International Labor Organization (ILO) Nomor 204 tahun 2015 terkait langkah-langkah transisi dari ekonomi informal ke formal. Adapun strategi kebijakan yang disarankan adalah memperluas cakupan jaminan sosial hingga ke pekerja informal; menyederhanakan sistem perpajakan agar biaya formalitas terjangkau; memperkuat dialog pemerintah, pekerja informal, dan pengusaha; mendukung pelatihan keterampilan; pengembangan wirausaha; serta akses ke pembiayaan agar usaha informal bisa berkembang menjadi formal; dan memperbaiki kerangka hukum pekerjaan informal agar lebih mudah berpindah ke formal.

Kebijakan ini tidak dapat hanya dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, akan tetapi butuh dukungan dari instansi lain, seperti Kementerian Keuangan untuk masalah perpajakan; BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan nasional; Kementerian Dalam Negeri untuk pendanaan jaminan sosial; Perbankan untuk bantuan kredit; Instansi swasta untuk pemagangan; Kementerian Sosial untuk sekolah rakyat; Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pemberdayaan nelayan. Koordinasi dapat ditingkatkan dalam konteks pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang tidak hanya berbicara mengenai hubungan industrial tapi juga bagaimana mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, pasar kerja yang efisien, *link and match* pendidikan, pelatihan dan industri serta adanya jaminan perlindungan dan peluang kerja yang berkelanjutan.

Penutup

Dominasi pekerja informal dinilai tidak terlalu baik karena dalam jangka panjang berdampak negatif bagi pekerja dan negara. Penyebab dominasi tersebut antara lain minimnya lapangan kerja formal, rendahnya kualitas tenaga kerja, mudahnya akses bekerja secara informal, sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar, dan terbatasnya pendataan. Sedangkan upaya mengatasinya antara lain dengan memperbanyak lapangan kerja formal, memaksimalkan sekolah rakyat dan pemagangan, serta memperluas cakupan jaminan sosial dan memperbaiki pendataan.

Usaha ini membutuhkan kerjasama yang baik antarpemangku kepentingan. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan harus mendorong pemerintah

untuk memperkuat sinergi antarinstansi sehingga dapat tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung perkembangan pekerjaan formal. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan pemerintah akan bahaya dominasi pekerja informal.

Referensi

- Anggraeni, R. (2024, September 19). Pekerja informal jadi beban ekonomi Indonesia? *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241219/12/1825672/pekerja-informal-jadi-beban-ekonomi-indonesia>
- Antoni, S. (2025, November 13). Pemerintah percepat program PSR dengan atasi hambatan. *Antaraneews.com*. <https://jambi.antaraneews.com/berita/638309/pemerintah-percepat-program-psr-dengan-atasi-hambatan>
- Badan Pusat Statistik. (2025a, November 5). Berita resmi statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2480/indeks-pembangunan-manusia-ipm-indonesia-tahun-2025-mencapai-75-90-meningkat-0-88-poin-dibandingkan-tahun-sebelumnya-yang-sebesar-75-02-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025b, Februari). Indikator pasar tenaga kerja. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/30/7cc0d8a5ea09515a0b2a2729/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2025.html>
- Chaterine, R.N. & Akbar, N.A. (2025, September 15). Ini 5 program penyerapan tenaga kerja dari Prabowo: Koperasi desa hingga revitalisasi tambak. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/15/16202711/ini-5-program-penyerapan-tenaga-kerja-dari-prabowo-koperasi-desa-hingga>.
- Lismalasari, E. & Aswitari, L.P (2021). Analisis beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima perempuan di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(3), 986-1013.
- Tigauw, N.L. (2025, November 16). Pemkot Manado beri perlindungan BP JAMSOSTEK pada pengurus dan pengawas KMP. *Antaraneews.com*. <https://manado.antaraneews.com/berita/300513/pemkot-manado-beri-perlindungan-bpjamsostek-pada-pengurus-dan-pengawas-kmp>